

TAJUK RENCANA

Mengungkit Netralitas dengan Sanksi

KETIDAKNETRALAN pejabat daerah, TNI/Polri adalah cerita lama. kisah ketidaknetralan itu selalu muncul dalam gelaran pemilihan umum, baik pilpres maupun pilkada. Dan kini, beberapa hari menjelang Pilkada 2024, hal itu kembali diungkit. Kian menarik ketika Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkap selama Pemilu 2024 pihaknya menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Media juga acap mengungkap upaya petahana dalam pilkada, yang mencoba memuluskan kemenangan lewat alat-alat negara.

Netralitas aparat sipil negara (ASN), TNI/Polri sangat krusial menjaga integritas kepercayaan public. Mereka diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi mendukung calon tertentu atau terlibat dalam kampanye politik. Menjaga netralitas seharusnya menjadi bagian komitmen anak bangsa memperkuat demokrasi di Indonesia. Apalagi soal netralitas sudah diatur dalam Undang-undang. UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian

Faktanya, dari laman kasn.go.id (23/2) Komisioner KASN, Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN, Arie Budhiman menyebut, dari 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024, 197 di antaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi KASN agar dijatuhi sanksi. Dan menjelang Pilkada 2024 Arie mengatakan potensi kenaikan pelanggaran netralitas ASN. Arie meyakini pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 akan melonjak 2 - 3 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah pelanggaran pada Pilkada 2020.

Padahal netralitas ASN, TNI/Polri akan membantu menciptakan suasana persaingan yang sehat antara calon-calon kepala daerah. Kemendagri pun berupaya menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024 ini demi terlaksananya demokrasi yang adil dan transparan. Untuk itu Kemendagri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), KASN dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerbitkan surat edaran bersama. SE Bersama menginstruksikan semua ASN agar menghindari segala bentuk keterlibatan politik, yang disahkan 22 September 2024 lalu.

Tentu, aturan bersama mengatur soal netralitas ini sangat penting. Kini, pengajanan netralitas ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hukuman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat daerah dan TNI/Polri. Ketentuan tersebut tertuang dalam putusan MK yang memasukkan frasa ‘pejabat daerah’ dan ‘anggota TNI/Polri’ ke dalam norma pasal 188 UU No 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sehingga Pasal 188 UU 1/2015 berbunyi : *Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil negara, Anggota TNI/Polri, kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 atau paling banyak Rp 6.000.000,00.*” (KR, 16/11)

Minimnya sanksi dalam UU ASN, TNI dan Polri dinilai yang membuat ketidaknetralan, bak kemesraan : tidak pernah berlalu. Maka Keputusan MK layak diacungi jempol. Ada harapan akan sanksi yang tegas. Namun sejumpat pertanyaan kemudian tercuat. Dengan pidana maksimal 6 bulan dan/atau denda Rp 6 juta apakah Keputusan MK ini akan membuat ASN, TNI/Polri bersikap netral dalam pemilu?

Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Namun sepertinya, mengungkit netralitas dengan sanksi tersebut tidak akan berpengaruh di negeri yang sebagian warganya menganut cara berpikir *yen ora ngedan ora keduman*. Untuk kepentingan bangsa negara, mungkin ini saatnya para wakil rakyat, anggota dewan yang terhormat kembali memikirkan perbaikan, perubahan atau penggantian undang-undang pilkada. Kalau niatnya menghadirkan pemilihan umum yang demokratis nyata adanya. □f

Muhammadiyah Menyongsong Kemakmuran

MILAD Muhammadiyah ke-112 yang diperingati pada 18 November 2024 menyematkan tema konstruktif bertajuk ‘Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua’. Tema ini menjadi pemantik bagi masyarakat bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia selalu hadir dalam memperbaiki keadaan dis-paritas yang masih merebak. Lewat tindakan strategisnya, Muhammadiyah tegap menjalankan inisiatif melalui program-program kemanusiaannya dan tentunya saling bertautan bersama pemerintah, keberpihakan pada masyarakat, dan tindakan kebenaran.

Muhammadiyah terus berkontribusi dalam upaya gerakan dakwah *amar ma’ruf nahi munkar*. Merujuk pada tema milad Muhammadiyah ke-112 ini menegaskan bahwa pentingnya keistikamahan dalam komitmennya memperjuangkan kesejahteraan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di mana jarum sosial untuk hal kemakmuran masih perlu ditingkatkan dan upaya tersebut bagian dari keutamaan Muhammadiyah. Dilansir pada laman krjogja.com (12/10), Prof Dr KH Haedar Nashir MSi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali terpilih sebagai salah satu dari The World’s 500 Most Influential Muslims 2025 yang juga tokoh muslim terkemuka di beragam bidang. Semenjak menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 2015, Haedar Nashir berfokus pada pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang inklusif. Penghargaan Zayed Award 2024 pada Februari lalu menjadi salah satu artefak bahwa Muhammadiyah tidak hanya diakui secara nasional tetapi juga global.

Muhammadiyah terus mengembangkan berbagai inisiatif sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Surat Kabar Harian Kedaulatan Yogyakarta (9/11) memberitakan saat Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin berada di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro Yogyakarta pada 8 November 2024, keduanya membahas isu kemerdekaan

Ichsan Y Nuansa

Palestina. Muhammadiyah pun dengan komitmennya terus mendukung perjuangan Palestina di tengah tantangan politik internasional.

Organisasi ini menekankan pentingnya integrasi sosial, terutama di wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, di mana mayoritas penduduknya beragama non Islam, dan didirikan empat universitas di Papua dan dua di NTT dengan tujuan menciptakan ruang belajar untuk



GRAFIS JOS

kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia seperti konflik di Filipina bagian selatan hingga Thailand, sampai pada program kemanusiaan di Rohingya dan Cox’s Bazar.

Pencapaian dakwah Muhammadiyah di era ini sangat luar biasa, terlebih melihat tantangan perubahan zaman yang begitu kompleks. Pembahasan di atas menjadi cerminan ulang bahwa KHA Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga melakukan hal serupa di masa silam. Hadjid (2021:85) menerangkan bahwa KHA Dahlan ketika mempelajari surat At-Taubah ayat 34-35 pernah menggoncangkan hatinya. Buku yang berjudul ‘Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan’ terbitan Suara Muhammadiyah tersebut memberikan kilasan balik tentang kewajiban para ulama dan pemimpin Islam untuk

Menciptakan ‘Employee Engagement’ Bagi Gen Z

BELAKANGAN ini muncul istilah baru dalam dunia kerja, yaitu *“the great resignation”*, yang menggambarkan karyawan potensial dan didominasi oleh Gen Z, tanpa ragu melepaskan posisi di perusahaan ketika ancaman resesi terbayang di depan mata, sehingga membuat bingung banyak perusahaan. Saat ini, hubungan antara karyawan dengan perusahaan mengalami perubahan yang cepat dengan komposisi angkatan kerja sebagian besar terdiri dari Gen Z. Kajian Delloite (2022) menunjukkan bahwa rata-rata Gen Z bertahan dalam sebuah perusahaan selama dua (2) tahun. Karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menjalin keterikatan yang baik dengan karyawan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar karyawan bertahan lama adalah dengan membangun *employee engagement*.

William Khan (1990) mendefinisikan *Employee Engagement* sebagai bentuk keterikatan karyawan dengan perusahaan. Karyawan yang memiliki rasa keterikatan yang tinggi cenderung akan bekerja dengan lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya perasaan positif dalam diri karyawan dan tidak menganggap suatu pekerjaan sebagai beban. *Employee Engagement* menjadi salah satu faktor penting yang membantu meningkatkan produktivitas, khususnya di tengah guncangan adaptasi bisnis hampir seluruh sektor saat ini. *Engaged employee* disebut mampu meningkatkan keuntungan bisnis 300% lebih baik dibandingkan kompetitor. Sebagai contoh, salah satu institusi di Indonesia yang menerapkan *employee engagement* adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 12 April 2021, diberitakan bahwa BRI memberikan *Employee Stock Allocation* (ESA), yaitu pemberian sejumlah saham perusahaan kepada karyawan (insan BRILian) sesuai syarat yang sudah ditetapkan.

Terdapat delapan cara untuk meningkatkan *employee engagement* dalam perusahaan. Pertama, memba-

Endang Raino Wirjono

ngun koneksi emosional antara karyawan dan organisasi, keterlibatan karyawan akan meningkat saat karyawan merasa pekerjaan mereka bermakna dan selaras dengan nilai-nilai pribadi. Kedua, membuat pekerjaan karyawan lebih menyenangkan dan bermakna sehingga karyawan akan menikmati pekerjaan, cenderung lebih termotivasi dan produktif. Ketiga, optimalisasi rasa percaya diri karyawan, agar karyawan berani mengambil inisiatif dan terlibat secara aktif dalam pekerjaan. Keempat, meningkatkan efisiensi sistem kerja untuk membantu mengurangi frustrasi karyawan dan meningkatkan produktivitas. Kelima, memperbaiki cara komunikasi untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan semua karyawan merasa terhubung dan didengar. Keenam, memberikan pengakuan yang layak atas kerja keras dan usaha karyawan, pengakuan yang tepat waktu dan tulus dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Ketujuh, berinvestasi pada karyawan melalui pelatihan agar karyawan merasa kepedulian perusahaan terhadap pertumbuhan karyawan sehingga karyawan akan lebih terlibat dan termotivasi. Kedelapan, fokus pada kesehatan karyawan, karyawan lebih mudah terlibat dalam pekerjaan jika kesejahteraan baik.

Dalam menghadapi karyawan Gen Z, perusahaan memerlukan kiat-kiat ekstra untuk menciptakan keterlibatan Gen Z dengan perusahaan. Pertama, memberikan umpan balik secara berkala karena karyawan Gen Z menghargai umpan balik dan evaluasi atas kerja keras mereka. Kedua, menawarkan jam kerja yang fleksibel karena Gen Z sangat menghargai waktu, dan salah satu prioritas utama mereka adalah menemukan keseimbangan yang tepat an-

memperhatikan soal sosial (kemakmuran rakyat). Kemakmuran itu adalah keadaan masyarakat agar dapat hidup tanpa kezaliman hingga tidak ada lagi penindasan-penindasan.

Upaya-upaya Muhammadiyah di atas akan terus hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan masyarakat yang berkemajuan. Sebagai seorang guru di lingkungan Muhammadiyah, saya mendapati musabab kelahiran amal usaha seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan untuk berkelanjutan dalam bidang ekonomi tidak lain diprioritaskan kepada masyarakat. Fasilitas-fasilitas tersebut yang didirikan pun telah tersebar di mana-mana. Dimensi sosial inilah bentuk jawaban mengurai tantangan-tantangan yang dialami oleh masyarakat ataupun dunia.

Muhammadiyah tidak sekadar gerakan namun bentuk dari kesadaran. Kesadaran nyata bahwa Allah Swt telah mengadakan waktu dan arah tujuan untuk mencapai segala maksud. Semua kondisi tersebut menyangkut aspek sosial, yaitu meneruskan kondisi lingkungan hidup dengan cara memperbaiki kondisi diri sendiri dan memperbaiki masyarakat, kemudian mentransformasikannya menjadi kebudayaan yang progresif. Budaya konstruktif ini menjadi gambaran kesejahteraan yang sesungguhnya, dan di sini kehadiran Muhammadiyah

selalu berusaha untuk mempertahankan.

*) **Ichsan Yunianto Nuansa Putra MPd Gr** (Ichsan Nuansa) guru Bahasa Indonesia dan guru Teater di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sekretaris MGMP Bahasa Indonesia SMA D.I. Yogyakarta dan Kota Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). **Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH. **Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB. **Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi. **Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS. **Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE **Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanrkryk23@yahoo.com, iklanrkryk13@gmail.com. **Langganan** per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaraga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.